

MEMAHAMI KORUPSI DARI PERSPEKTIF PERILAKU ORGANISASI: MENGAPA SESEORANG TERJEBAK DALAM PERILAKU KORUP?

Ely Susanto
plenthing@yahoo.com

Diterima: 3 Maret 2009

Diproses: 10 Maret 2009

ABSTRACT

Corruption is a classical phenomenon but still interesting to be discussed. Corruption does not only contribute to negative impacts on the economic growth but also generates negative impacts on the moral ground of the entire country. Many studies have investigated the determinants of corruptive behaviors. Of those studies, two dominant approaches have been used by previous scholars to explain corruption phenomenon; economic approach and organizational behavior approach. In this study the organizational behavior approach is used including the use of social information processing theory to theoretically explain why good people are trapped to corrupt when they are part of public organization. Detailed reasons why this approach is used and how the social information processing theory explains logically the corruptive behaviors in organizations are further discussed.

Keywords: *corruption, determinant of corruptive behaviors and social information processing theory*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah klasik (Pinto, Leana, & Pil, 2008) namun tetap menarik untuk didiskusikan. Bukan saja karena korupsi merupakan fenomena umum yang sering terjadi di dalam organisasi, baik dinegara maju maupun negara berkembang (Misangyi, Weaver & Elms, 2008), tetapi korupsi juga bisa berdampak negatif bagi pembangunan perekonomian suatu bangsa (Dreher, Kotsogiannis, & McCorrison, 2007). Tidak hanya itu, dampak negatif dari korupsi dianggap lebih besar di banding prostitusi, seperti yang diungkapkan oleh Karl Krauss "*corruption is worse than prostitution. The latter might endanger the morals of an individual, the former invariably endangers the morals of the entire country*" (Bose, Capasso, & Murshid, 2008: 1173). Bank Dunia secara tegas telah mengatakan bahwa korupsi merupakan halangan terbesar bagi suatu bangsa untuk melaksanakan pembangunan ekonomi

dan sosialnya (World Bank, 2001, Dreher et al., 2007). Lebih lanjut Bank Dunia menjelaskan bahwa jika suatu negara mampu mengatasi masalah korupsi, memperbaiki tata kelola ke pemerintahannya dan menegakkan supremasi hukum, negara tersebut akan bisa meningkatkan pendapatan per kapitanya sampai pada kisaran 400% (World Bank, 2004; Dreher et al., 2007). Dalam konteks Indonesia, korupsi tidak hanya membuat masyarakat Indonesia terpuruk dalam kemiskinan, tetapi juga telah membuat sumber daya alam yang begitu melimpah gagal dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama (Kolstad & Wiig, 2009).

Pemerintah Indonesia bukannya berdiam diri melihat fenomena korupsi yang sudah menjalar ke hampir semua aspek kehidupan. Berbagai program pemberantasan korupsi sudah dijalankan sejak bergulirnya era reformasi. Hamilton-Hart (2001) misalnya, mencatat bahwa sejak tahun 1998 pemerintah yang berkuasa sudah mengeluarkan beberapa program reformasi di bidang politik, sosial dan hukum. Reformasi di bidang politik ditandai dengan semakin meningkatkan independensi dan *power* Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemerintah yang berimplikasi pada peningkatan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kebebasan pers ditandai dengan penguatan peran media massa dalam memberitakan kasus-kasus korupsi, yang bisa berimplikasi pada terciptanya hukuman sosial bagi pelaku korupsi dan munculnya organisasi-organisasi non pemerintah yang memfokuskan pada masalah-masalah korupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW).

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa perilaku-perilaku koruptif masih muncul bahkan cenderung semakin kentara, tidak hanya di tingkat pusat namun juga di tingkat daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi, Purnomo, dan Damayanti (2007) misalnya bisa menjadi bukti bahwasanya perilaku-perilaku koruptif bukan lagi menjadi monopoli pejabat pusat namun sudah menyebar sampai ke tingkat daerah. Hal ini membuktikan bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah belum membuahkan hasil yang maksimal dan optimal. Menariknya adalah beberapa orang yang terlibat korupsi adalah mereka-mereka yang mempunyai posisi dan jabatan tinggi, baik di parlemen maupun dipemerintahan. Lalu pertanyaannya adalah mengapa mereka bisa berperilaku koruptif padahal jika dilihat dari jabatan, struktur gaji dan variabel pendidikan, mereka adalah orang-orang yang mempunyai jabatan, bergaji dan berpendidikan relatif tinggi dibanding pegawai lain? Sering kita mendengar cerita bahwa salah satu tujuan untuk masuk ke struktur kekuasaan adalah untuk berjuang melakukan perubahan ke arah lebih baik. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketika sudah di dalam struktur kekuasaan, mereka jatuh dalam pusaran arus korupsi. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Mengapa mereka gagal membawa perubahan dan malah sebaliknya jatuh ke pusaran arus korupsi?

Secara umum, jawaban terhadap masalah tersebut akan diarahkan kepada

masalah personaliti seseorang, misalnya sifat tamak atau budaya organisasi yang korup (Ashforth, Gioia, Robinson, & Treviño, 2008). Namun Ashforth, et al. (2008) lebih lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya masih banyak hal yang sulit dijelaskan secara logis terkait dengan mengapa seseorang berperilaku koruptif. Tulisan ini mencoba mendiskusikan secara teoritis faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku koruptif dengan mengadopsi pendekatan perilaku organisasi termasuk penggunaan *social information processing theory* (Salancik dan Pfeffer, 1978). Secara singkat teori ini menjelaskan tentang bagaimana lingkungan atau konteks mempengaruhi sikap dan perilaku koruptif individu. Dengan pemahaman tersebut nantinya akan diperoleh penjelasan-penjelasan teoritis tentang bagaimana seseorang bisa berperilaku koruptif ketika masuk dalam struktur kekuasaan meskipun awalnya mereka-mereka adalah orang-orang yang "bersih". Melalui pemahaman tersebut diharapkan pendekatan-pendekatan yang diharapkan bisa berfungsi sebagai *early warning system* bagi seseorang untuk tidak terjebak dalam arus korupsi akan mudah diformulasikan. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pencegahan merupakan cara yang terbaik untuk menghandle masalah korupsi ketika korupsi sudah melekat dalam rutinitas sehari-hari (Ashforth dan Anand, 2003).

MENGAPA PERILAKU KORUPTIF TERJADI?

Secara umum, korupsi bisa dipahami sebagai penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi (Lambert-Mogiliansky, Majumdar, and Radner, 2007; Klitgaard, 1991). Definisi yang sama diungkapkan oleh Misangyi et al. (2008). Mengutip pendapat dari Tanzi (1999) dan Shleifer dan Vishny (1993), mereka mengatakan bahwa, dalam perspektif ekonomi, korupsi bisa dipahami sebagai penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi melalui aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan hukum (hal. 751). Peneliti lain berpendapat bahwa korupsi rawan terjadi jika seseorang atau kelompok, yang menduduki jabatan atau posisi tertentu, memiliki diskresi dan kontrol terhadap biaya dan manfaat ekonomi sehingga orang atau kelompok tersebut mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari diskresi dan kontrol yang dimilikinya (Mauro, 1996; Misangyi, et al., 2008).

Dalam level organisasi, Pinto, Leana dan Pil (2008) mengkategorisasikan definisi korupsi menjadi dua: *An organization of corrupt individuals* (OCI) dan *An organization corrupts* (OC). *An organization of corrupt individuals* diartikan sebagai korupsi yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk kepentingan pribadi (definisinya hampir sama dengan definisi korupsi dalam perspektif ekonomi) sedang *An organization corrupts* (OC) dipahami sebagai kegiatan korupsi yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk kepentingan

organisasi (definisinya sama dengan definisi korupsi dalam perspektif sosiologi). Contohnya *corporate crime* yang dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan mereka, misalnya manipulasi pajak perusahaan atau dalam kasus kebangkrutan perusahaan Enron di Amerika.

Dalam konteks organisasi publik, Blackburn, Bose, dan Haque (2006) secara khusus mendefinisikan korupsi dalam sektor publik sebagai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik melalui eksploitasi kewenangan diskresi yang didelegasikan kepadanya untuk kepentingan pribadinya, dengan melakukan tindakan-tindakan pencarian keuntungan yang bertentangan dengan hukum (hal. 2448). Mendasarkan pada uraian di atas, dalam artikel ini korupsi bisa dipahami sebagai aktivitas yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok melalui penyalahgunaan jabatan atau posisi dalam struktur organisasi, sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan yang melawan norma hukum. Hal ini dimungkinkan karena individu atau kelompok tersebut mempunyai otoritas dan diskresi untuk mengontrol alokasi sumber daya yang memberikan mereka peluang untuk mengambil keuntungan dari diskresi dan kontrol yang dimilikinya.

Ada dua perspektif yang banyak digunakan untuk menjelaskan masalah korupsi: perspektif ekonomi dan perilaku organisasi (Misangyi et al., 2008). Seperti yang sudah dijelaskan di atas, korupsi dalam perspektif ekonomi dipahami sebagai penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Motif untuk memperoleh keuntungan pribadi menjadi pendorong orang berperilaku koruptif. Hal ini dimungkinkan jika kondisi sebagai berikut muncul, pertama, adanya monopoli dalam aktivitas pelayanan publik, kedua, adanya diskresi untuk menginterpretasikan aturan formal (hukum) untuk menentukan siapa yang berhak untuk memperoleh manfaat dari sebuah aktivitas termasuk di dalamnya persyaratan dan prosedur untuk mendapatkannya, ketiga rendahnya tingkat akuntabilitas terhadap aktivitas-aktivitas yang sudah dijalankan (Klitgaard, 1988:75).

Para ahli yang mengadopsi pendekatan ini menekankan pada pemberian insentif dan hukuman yang dituangkan dalam aturan formal untuk mengatasi masalah korupsi (Bardhan, 2005; Misangyi, et al., 2008). Kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2004-2009 bisa dijadikan contoh model penanganan korupsi yang mengadopsi pendekatan ini, dimana pejabat KPU yang terlibat korupsi diberi hukuman. Contoh lainnya adalah Departemen Keuangan melakukan reformasi birokrasi melalui perubahan skema renumerasi (insentif). Diharapkan melalui reformasi seperti ini, kinerja staf di Departemen Keuangan bisa meningkat dan korupsinya menurun. Jika dirunut dari sejarah, model reformasi renumerasi sebenarnya sudah pernah dilakukan di China pada jaman Dinasti Ch'ing. Untuk mendorong staf berperilaku jujur, ada tambahan insentif (*extra*

allowance) yang disebut dengan *yang-lien yin* (Bardhan, 2005). Di Amerika, ada persaingan antar kantor pelayanan publik dalam rangka untuk mengatasi masalah korupsi. Untuk mengurus passport, setiap orang bisa pergi ke kantor pos terdekat. Jika di kantor pos A ada *invisible cost*, mereka bisa pergi ke kantor pos B atau C, yang tidak menarik biaya siluman.

Perspektif kedua, yaitu perilaku organisasi, menekankan pada aspek normatif dan kognitif dari perilaku korupsi (Misangyi, et al., 2008). Perspektif ini lebih menitikberatkan pada usaha untuk memahami bagaimana dampak normatif dan kognitif dari lingkungan sosial dalam mempengaruhi orang untuk berperilaku koruptif sehingga korupsi bisa dipahami sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya (Ashforth & Anand, 2003). Kajian-kajian literatur di ilmu manajemen, yang dilakukan oleh Ashforth, et al. (2008) menemukan bahwa awalnya, faktor demografik ditengarai menjadi faktor yang mendorong orang untuk berperilaku koruptif, seperti hasil penelitiannya Wheeler, Weisburd, Waring, dan Bode (1988). Dalam penelitian tersebut dicontohkan bahwa *a typical white collar offender is a middle-aged white male* (Ashforth et al., 2008: 672).

Penelitian selanjutnya mengarahkan kajiannya pada sifat (*predisposition*) seseorang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa sifat seseorang yang mendorong orang untuk berperilaku koruptif misalnya kurangnya integritas (Frost & Rafilson, 1989); lemahnya kontrol diri ((Marcus & Schuler, 2004); rendahnya rasa empati (Eisenberg, 2000); dan *lack of moral identity* (Aquino & Reed, 2002). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti lain berpendapat bahwa korupsi bukan disebabkan oleh karakter atau sifat individu namun disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kognisi dan kemampuan untuk memproses informasi sosial seseorang. Akibatnya adalah terkadang seseorang tidak mampu mengenali dan menyadari bahwa dirinya sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang melanggar hukum dan etika organisasi (Reynolds, 2006). Hal tersebut terjadi karena korupsi sudah melekat dalam organisasi dan menjadi sebuah hal yang wajar (*routines*). Dalam tulisan ini, perspektif perilaku organisasi akan digunakan untuk menjelaskan mengapa orang bisa terjebak dan terseret dalam perilaku koruptif. Dengan pendekatan ini diharapkan akan diperoleh pemahaman tentang bagaimana orang bisa terjebak untuk berperilaku koruptif termasuk didalamnya bagaimana mencegahnya. Ide ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa pencegahan merupakan cara yang terbaik untuk menangani masalah korupsi ketika korupsi sudah melekat dalam rutinitas sehari-hari (Ashforth dan Anand, 2003), sementara pendekatan ekonomi gagal dalam mengatasinya misalnya pendekatan hukum yang belum optimal mengurangi korupsi.

SOCIAL INFORMATION PROCESSING THEORY

Menurut Salancik and Pfeffer (1978), *Social information processing theory* muncul sebagai jawaban atas kritik yang dialamatkan pada *need-satisfaction model*. Menurut Salancik dan Pfeffer (1978), *need-satisfaction model* menekankan pada ide bahwa perilaku dan *attitude* seseorang di tempat kerja bisa diprediksi dari sifat (traits) atau atribut yang dimilikinya. Padahal beberapa peneliti seperti Mischel (1968); Weiss dan Adler (1984) mengemukakan bahwa personaliti seseorang merupakan prediktor yang lemah untuk menjelaskan perilaku seseorang.

Di sisi yang lain, Griffin (1983) menyatakan bahwa lingkungan sosial merupakan faktor yang penting untuk memahami perilaku seseorang. Sejalan dengan pendapat tersebut, Roethlisberger dan Dickson (1939: 557) mengatakan bahwa "*the meanings which any person in an industrial organization assigns to the events and objects in his environment are often determined by the social situation in which the events and objects occur.*" Dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, Salancik dan Pfeffer (1978) mengembangkan sebuah teori yang kemudian dikenal dengan sebutan *Social information processing theory*.

Teori ini muncul dengan mendasarkan pada sebuah premis bahwa manusia merupakan individu yang organis adaptif terhadap lingkungannya. Maksudnya adalah seseorang cenderung mengadaptasikan perilaku, *attitude* dan kepercayaannya terhadap lingkungan sosial saat ini, perilaku serta situasi masa lalu (Salancik Dan Pfeffer, 1978). Contohnya, A diterima bekerja di Pemda B dan di tempatkan di Dinas C. Di Dinas C, lingkungan kerja memperbolehkan orang datang terlambat dan pulang sebelum waktunya. Dengan kondisi lingkungan sosial seperti ini, lambat laun A mungkin akan mengadaptasikan perilaku dan *attitude*-nya dengan datang terlambat dan pulang lebih awal. Hal ini didorong oleh informasi sosial yang datang padanya, yang memperkuat persepsi dan opininya bahwa datang telat dan pulang awal merupakan hal biasa dan biasa dilakukan oleh siapa saja.

Teori ini juga menjelaskan bahwa untuk mengetahui mengapa seseorang berperilaku positif atau negatif misalnya berperilaku koruptif, seseorang bisa mengetahuinya dengan cara mempelajari lingkungan sosial di mana dia bekerja dan mengadaptasikan perilaku dan *attitude*-nya (Salancik dan Pfeffer, 1978, hal. 226). Hal ini dikarenakan lingkungan kerja bisa membentuk persepsi dan opini seseorang, baik yang bersifat positif atau negatif, yang selanjutnya bisa berpengaruh kepada perilakunya. Jika persepsi dan opini positif yang terbentuk, seseorang mungkin akan berperilaku positif, yang bisa bermanfaat bagi kinerja organisasi. Namun jika persepsi dan opini negatif yang terbentuk, dikawatirkan seseorang akan berperilaku negatif yang akan berdampak negatif terhadap kinerja organisasi.

Ada tiga sumber informasi sosial yang berpengaruh terhadap pembentukan persepsi dan opini seseorang, yaitu *objective sources*, *social sources* dan *personal sources*

(Griffin, 1983). *Objective sources* bersumber dari elemen pekerjaan, kebijakan dan prosedur dalam pekerjaan, kondisi kerja dan aspek teknologi dalam pekerjaan sedang *sosial sources* bisa berasal dari teman, atasan dan bawahan. Seperti dijelaskan oleh Festinger (1954), dikutip oleh Salancik dan Pfeffer (1978), dengan teori perbandingan sosialnya, individu akan mencari informasi ke teman atau atasan jika menemukan ambiguitas dalam pekerjaannya. Tujuannya adalah untuk membandingkan antara informasi yang dia punya dengan informasi dari teman atau atasan dengan tujuan untuk menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah ambiguitas tersebut. Terakhir, *personal sources* bersumber dari pengalaman dan latar belakang seseorang. Misalnya A mempunyai pengalaman pekerjaan yang melibatkan banyak orang dan sekarang dia harus kerja sendiri. Dengan membandingkan kondisi saat ini dan sebelumnya, mungkin A akan mempunyai persepsi pekerjaan yang sekarang lebih mudah dan tidak kompleks dibanding dengan pekerjaannya yang dulu. Dari ketiga sumber tersebut, Griffin (1983) menyimpulkan bahwa orang akan menggunakan informasi sosial yang mudah diproses (hal. 187) untuk membentuk persepsi dan opininya.

PERILAKU KORUPTIF DI INDONESIA: MENGAPA SESEORANG BISA TERJEBAK DALAM PERILAKU KORUPTIF?

"Anticorruption campaigns have always begun with enthusiasm and ended with cynicism" (Krastev, 2000: 24). Mungkin kalimat tersebut tepat untuk menggambarkan kondisi bangsa Indonesia. Sejak bergulirnya era reformasi, setiap kandidat, baik kandidat presiden maupun kandidat legislatif pusat dan daerah, selalu mengusung pemberantasan korupsi sebagai tema kampanyenya. Dengan suara lantang dan semangat yang berapi-api, mereka berjanji untuk menindak segala bentuk korupsi kelak jika mereka terpilih. Namun, janji tinggal janji. Jabatan digenggam, korupsi dibiarkan merajalela. Bahkan diantara mereka malah ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi, seperti yang dijabarkan dalam penelitiannya Rinaldi, et al. (2007).

Masih banyaknya anggota DPR, DPRD dan pejabat publik lainnya yang tersangkut masalah korupsi menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih belum optimal. Meskipun mereka adalah orang-orang pilihan dengan fasilitas yang serba wah, mereka tetap saja tergiur untuk melakukan korupsi. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa ada diantara mereka yang terjebak dalam perilaku koruptif meskipun awalnya mereka adalah orang-orang yang tergolong "bersih"? Apakah sifat permisif dan toleransi terhadap perilaku koruptif yang ada di masyarakat menyebabkan mereka ikut-ikutan untuk berkorupsi atau ada faktor lain yang bisa menjelaskan fenomena tersebut?

Seperti yang sudah diuraikan di bagian awal, perilaku koruptif merupakan perilaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok

melalui penyalahgunaan jabatan atau posisi dalam struktur organisasi, sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan yang melawan norma hukum. Hal ini dimungkinkan karena individu atau kelompok mempunyai otoritas dan diskresi untuk mengontrol alokasi sumber daya yang memberikan mereka peluang untuk mengambil keuntungan dari aktivitas diskresi dan kontrol tersebut.

Di sisi lain, *social information processing theory* menjelaskan bahwa seseorang cenderung mengadaptasikan perilaku, *attitude* dan kepercayaannya terhadap lingkungan sosial, perilaku dan situasi masa lalunya. Hal ini dilakukan melalui pengumpulan informasi-informasi sosial yang diperoleh dari lingkungan kerja dan pengalaman masa lalu. Informasi sosial tersebut selanjutnya diolah menjadi bahan untuk membentuk persepsi dan opini terhadap lingkungan sosialnya melalui proses *sense making* (Lamert, 2002). *Sense-making* menurut Lamert (2002) merupakan proses untuk menginterpretasikan dan memahami fenomena dalam organisasi yang terkadang ambigu, tidak pasti dan sulit dipahami.

Sense making dilakukan melalui pengumpulan informasi sosial dari teman, atasan atau bawahan. Jika informasi sosial yang diperoleh mampu memberikan pemahaman yang logis terhadap fenomena tersebut, hal tersebut akan memperkuat persepsi dan opini yang sedang dibangun, baik yang bersifat positif atau negatif, yang selanjutnya bisa mempengaruhi perilakunya. Misalnya, sebagai PNS yang baru, dia melihat teman-temannya meminta imbalan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengalaman masa lalu menginformasikan kepadanya bahwa itu adalah perilaku korupsi, yang tidak seharusnya dijalankan. Namun informasi sosial yang diperoleh dari teman-temannya memberitahukan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan diinstansinya. Dengan menarik ongkos pelayanan, mereka akan memperoleh tambahan penghasilan. Dua sumber informasi sosial yang bertolak belakang tersebut menimbulkan sebuah dilema antara melakukan dan tidak melakukan. Derasnya arus informasi sosial yang mengatakan bahwa hal tersebut sudah merupakan kebiasaan, tidak hanya bawahan namun juga pimpinan menyebabkan proses *sense making* akan memproduksi pemikiran bahwa praktek penarikan ongkos terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai sesuatu yang biasa dan boleh dilakukan termasuk dirinya.

Ilustrasi di atas mungkin bisa digunakan untuk memotret dan menjelaskan secara teoritis dan logis terhadap fenomena di masyarakat kita mengapa banyak orang ketika masuk organisasi, terseret dalam perilaku koruptif. Latar belakang pendidikan, status sosial dan keagamaan ternyata belum bisa menjamin bahwa ketika masuk dalam lingkaran birokrasi dan organisasi publik lainnya mampu menjaga konsistensi perilakunya. Hal ini mungkin disebabkan karena derasnya arus informasi sosial yang bersumber dari lingkungan kerja, teman, atasan, dan bawahan lambat laun akan mampu mengikis dan merubah kepercayaan seseorang.

Seseorang yang awalnya paham betul bahwa perilaku koruptif misalnya melalui pungutan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan publik merupakan perbuatan korupsi dan harus di jauhi lambat laun akan berubah seiring dengan derasnya informasi sosial dari lingkungan kerjanya yang meligitimasi perilaku koruptif tersebut. Legitimasi dari lingkungan kerja akan ditangkap sebagai sinyal bahwa melakukan perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang "sah".

Kondisi di atas diperparah jika atasan merestui atau bahkan mendorong bawahannya untuk melakukan perbuatan korupsi demi prestasi atasan. Akibatnya adalah bawahan tersebut tidak mempunyai pilihan lain untuk tidak melakukan perbuatan korupsi tersebut kecuali kalau dia keluar atau menanggung resiko atas penolakannya. Tekanan-tekanan seperti ini biasanya menjadikan orang baik terdorong untuk berperilaku koruptif, seperti yang disampaikan oleh Ashforth, et al. (2008, hal. 672) "*the act of fulfilling one's role in the organization system can encourage good people to make bad ethical choices*". Media masa sering memberitakan tentang anak buah yang menjadi tersangka kasus korupsi karena menuruti perintah atasannya. Mereka selalu beralasan bahwa sebagai bawahan mereka takut untuk menolak perintah atasan.

Terakhir, keterbatasan kemampuan kognisi seseorang dan keterbatasan kemampuan untuk memproses informasi sosial seseorang bisa mendorong untuk berperilaku koruptif. Keterbatasan ini terkadang membuat seseorang tidak mampu mengenali dan menyadari bahwa dirinya sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang melanggar hukum dan etika organisasi (Reynolds, 2006). Praktek-praktek korupsi yang sudah melekat dalam rutinitas sehari-hari menjadikan seseorang terkadang gagal menangkap informasi sosial dari lingkungan sosialnya sebagai sinyal atau *early warning system* bahwa praktek tersebut masuk dalam kategori korupsi. Hal ini disebabkan karena mereka sudah mempersepsikan bahwa perilaku tersebut merupakan sebagai sesuatu yang legal dan sah meskipun bertentangan dengan peraturan dan etika organisasi. Bantahan pejabat publik yang menyatakan bahwa praktek-praktek seperti ini merupakan hal yang lumrah dan biasa dilakukan di organisasinya bisa dijadikan contoh bagaimana keterbatasan kemampuan kognisi seseorang dan keterbatasan kemampuan untuk memproses informasi sosial seseorang bisa mendorong untuk berperilaku koruptif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perilaku korupsi merupakan "virus" yang bisa menjalar dan menjangkiti siapa saja. Karena virus tersebut, orang yang awalnya "bersih" ketika masuk ke dalam struktur kekuasaan berubah drastis dan terjebak dalam perilaku koruptif. Banyak kajian-kajian yang sudah dipublikasikan, yang mendiskusikan tentang bagaimana orang bisa terdorong untuk berperilaku koruptif. Dari kajian tersebut ada dua

pendekatan utama yang sering digunakan untuk menganalisis perilaku koruptif yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku organisasi. Pendekatan ekonomi menjelaskan perilaku koruptif secara makro misalnya ada tidaknya monopoli, diskresi atau akuntabilitas sedang pendekatan perilaku organisasi lebih menekankan pada kondisi mikro misalnya tinggi rendahnya moralitas atau integritas seseorang. Dalam tulisan ini, pendekatan perilaku organisasi digunakan untuk menjelaskan secara teoritis mengapa seseorang ketika masuk dalam struktur kekuasaan (organisasi publik) bisa terjebak untuk berperilaku koruptif melalui pengadopsian *social information processing theory*. Berdasarkan teori tersebut perilaku koruptif terjadi ketika seseorang dihadapkan pada kondisi sosial di mana perilaku koruptif mendapatkan legitimasi sosial. Persepsi dan opini tentang legitimasi sosial tersebut dibentuk melalui pengolahan informasi sosial yang datang padanya. Informasi sosial yang polanya sama, frekuensinya tinggi dan dengan durasi yang relatif lama akan sedikit demi sedikit mengikis dan menggeser kepercayaan pribadi (*belief*) terhadap suatu fenomena kecuali individu tersebut mampu menjaganya. Jika informasi sosial yang datang padanya selalu menginformasikan bahwa beberapa perilaku koruptif merupakan sesuatu yang wajar di organisasi ini dan durasinya relatif lama maka individu tersebut lambat laun akan mempersepsikan bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang "sah".

Oleh karena itu, untuk meminimalisir dan mengeliminir perilaku koruptif ada dua pendekatan yang mungkin bisa dilakukan yaitu pencegahan dan pengobatan. Usaha pencegahan bisa dilakukan dengan memperbanyak informasi sosial di masyarakat tentang perilaku-perilaku apa saja yang masuk dalam kategori korupsi beserta sanksinya termasuk sanksi sosial dari lingkungannya. Informasi sosial tersebut harus diproduksi secara berulang-ulang dengan durasi waktu yang lama. Jika ini berhasil dilakukan, diharapkan seseorang akan memiliki *early warning sistem* atau rambu-rambu yang bisa digunakan untuk melakukan pencegahan. Karena sifatnya yang luas, peran media massa sangat vital dalam memproduksi informasi sosial seperti ini. Media massa diharapkan selalu memberitakan secara analitis perilaku-perilaku yang masuk dalam kategori korupsi beserta sanksinya. Selain media massa, peran tokoh agama, lembaga pendidikan, keluarga dan masyarakat juga berperan penting dalam memproduksi informasi sosial tersebut. Jika masing-masing elemen mau ikut ambil bagian, lingkungan sosial akan dipenuhi informasi sosial yang akan membantu mempengaruhi persepsi dan opini seseorang tentang perilaku korupsi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada perilaku individunya.

Pengobatan dilakukan ketika orang sudah masuk ke dalam organisasi. Alur logikanya hampir sama dengan pendekatan yang dilakukan untuk melakukan pencegahan. Organisasi harus memproduksi informasi sosial tentang perilaku-

perilaku mana yang diindikasikan sebagai perilaku koruptif beserta sangsinya. Kegiatan ini harus dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan berbagai macam media misalnya kegiatan keagamaan secara berkala, pemutaran film atau berita elektronik seminggu sekali, yang memberitakan bagaimana menderitanya ketika seseorang melakukan korupsi, tidak hanya bagi dirinya namun juga bagi keluarganya atau pemilihan pegawai yang "bersih" dengan insentif yang memadai. Diharapkan informasi sosial seperti ini akan berpengaruh terhadap pembentukan persepsi dan opini seseorang yang selanjutnya berpengaruh pada perilakunya untuk menjauhi perilaku-perilaku yang masuk dalam kategori korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aquino, K., & Reed, A., II, 2002. "The Self-Importance of Moral Identity". *Journal of Personality and Social Psychology*, 83: 1423-1440.
- Ashforth, B. E., & Anand, V. 2003. "The Normalization of Corruption in Organizations". *Research in Organizational*, 25: 1-52.
- Ashforth, B. E., Gioia, D. A., Robinson, S. L., & Treviño, L. K. 2008. "Introduction to Special Topic Forum: Re-viewing Organizational Corruption", *Academy of Management Review*, 33(3): 670-684.
- Bardhan, P. 2006. "The Economist's Approach to the Problem of Corruption", *World Development*, 34(2): 341-348.
- Blackburn, K., Bose, N., & Haque, M. E. 2006. "The Incidence and Persistence of Corruption in Economic Development", *Journal of Economic Dynamics & Control*, 30: 2447-2467.
- Bose, N., Capasso, S., & Murshid, A. P. 2008. "Threshold Effects of Corruption: Theory and Evidence", *World Development*, 36(7): 1173-1191.
- Dreher, A., Kotsogiannis, C., & McCorriston, S. (2007). "Corruption around the World: Evidence from a Structural Model", *Journal of Comparative Economics*, 35: 443-466.
- Eisenberg, N. 2000. "Emotion, Regulation, and Moral Development", *Annual Review of Psychology*, 51: 665-697.
- Festinger, L. 1954. "A Theory of Social Comparison Processes", *Human Relations*, 7: 114-140.
- Frost, A. G., & Rafilson, F. M. 1989. "Over Integrity Tests versus Personality-Based Measures of Delinquency: An Empirical Comparison", *Journal of Business and Psychology*, 3 : 269-277.
- Griffin, R. W. 1983. "Objective and Social Sources of Information in Task Redesign: A Field Experiment", *Academy of Management Review*, 28(2) :184-200.

- Hamilton-Hart, N. 2001. "Anti-Corruption Strategies in Indonesia", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(1): 65-82.
- Klitgaard, R. 1991. "Gifts and Bribes", dalam R. J. Zeckhauser (Ed.), *Strategy and Choice*. MIT Press Cambridge, MA.
- Klitgaard, R. E. 1988. *Controlling Corruption*. University of California Press, Berkeley.
- Kolstad, I., & Wiig, A. 2009. "Is Transparency the Key to Reducing Corruption in Resource-Rich countries?" *World Development*, 37(3): 521-532.
- Krastev, I. 2000. "The Strange (Re)Discovery of Corruption", dalam R. D. Elkana, A. Neier, & I. Rev (Ed.), *The Paradoxes of Unintended Consequences*. Central European University Press, Budapest, hlm. 23-42
- Lambert-Mogiliansky, A., Majumdar, M., & Radner, R. 2007. "Strategic Analysis of Petty Corruption: Entrepreneurs and Bureaucrats", *Journal of Development Economics*, 83: 351-367.
- Lamertz, K. 2002. "The Social Construction of Fairness: Social Influence and Sense Making in Organization", *Journal of Organizational Behavior*, 23: 19-37.
- Marcus, B., & Schuler, H. 2004. "Antecedents of Counterproductive Behavior at Work: A General Perspective", *Journal of Applied Psychology*, 89: 647-660.
- Mauro, P. 1996. *The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure*, <http://ssrn.com/abstract882994>, diakses September-882913, 882004.
- Misangyi, V. F., Weaver, G. R., & Elms, H. 2008. "Ending Corruption: The Interplay Among Institutional Logics, Resources, and Institutional Entrepreneurs", *Academy of Management Review*, 33(3): 750-770.
- Mischel, W. 1968. *Personality and Assessment*. Wiley, New York.
- Pinto, J., Leana, C. R., & Pil, F. K. 2008. "Corrupt Organizations or Organizations of Corrupt Individuals? Two Types of Organization-Level Corruption", *Academy of Management Review*, 33(3): 685-709.
- Reynolds, S. J. 2006. "Moral Awareness and Ethical Predispositions: Investigating the Role of Individual Differences in the Recognition of Moral Issues", *Journal of Applied Psychology*, 91: 233-243.
- Rinaldi, T., Purnomo, M., & Damayanti, D. 2007. *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah*. Justice for the Poor Project, Bank Dunia, Jakarta.
- Salancik, G. R., & Pfeffer, J. 1978. "A Social Information Processing Approach to Job Attitudes and Task Design", *Administrative Science Quarterly*, 23(2): 224-253.

- Shleifer, A., & Vishny, R. W. 1993. "Corruption", *Quarterly Journal of Economics*, 108: 599-617.
- Tanzi. 1991. "Corruption around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures", *IMF Staff Papers*, 45: 559-594.
- Weiss, H. M., & Adler, S. 1984. "Personality and Organizational Behavior", dalam B. M. S. a. L. L. Cummings (Ed.), *Research in Organizational Behavior*, 6: 1-50, Greenwich, JAI Press., CT.
- Wheeler, S., Weisburd, D., Waring, E., & Bode, N. 1988. "White Collar Crimes and Criminals". *American Criminal Law Review*, 25: 331-357.
- World Bank, 2001. <http://www.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/index.ctm>.
- World Bank, 2004. <http://www.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS>.